

# KRITIKAN KENABIAN GEREJA TERHADAP PEMBANGUNAN MODEL KAPITALISTIK

Oleh Dr Alexander Jebadu SVD  
Dosen Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero-Flores-NTT

Misi pembebasan Gereja yang berkisar pada opsi untuk memihak masyarakat miskin (*option for the poor*) dan opsi untuk menjaga keutuhan alam ciptaan (*option for creation*), serta mengutuk protagonis-protagonis penyebabnya, berjalan bersamaan sebagai satu paket yang tidak bisa dipisahkan satu dari yang lain. Sehubungan dengan hal ini, Gereja menggarisbawahi bahwa kedua opsi ini merupakan bagian konstitutif dari karya penginjilan dan merupakan kelanjutan dari misi penyelamatan oleh Allah sendiri (*missio Dei*). Selain itu, misi pembebasan yang diemban oleh Gereja ini telah setua Gereja sendiri. Namun sebagai doktrin resmi, misi pembebasan ini baru lahir pada akhir abad ke-19 yang ditandai dengan terbitnya Ensiklik *Rerum Novarum* (RN) dari Paus Leo XIII tahun 1891.<sup>1</sup> Ensiklik RN diterbitkan sebagai tanggapan kenabian Gereja atas masalah ketidakadilan sosial-ekonomi pada masa-masa awal dari gemuruh revolusi industri abad ke-18.

Revolusi industri pada abad 18 melahirkan dua model pembangunan. Model pertama adalah sebuah pembangunan dengan kapitalisme liberal atau ekonomi pasar bebas sebagai wahananya. Model ini diadopsi dan dikembangkan di Eropa Barat sehingga kemudian disebut ekonomi kapitalisme Barat. Model kedua, yang lahir sebagai reaksi terhadap kekerasan dan ketidakadilan dari model pembangunan ekonomi kapitalistik Barat, seperti nampak jelas dalam karya-karya Karl Marx dan Frederic Engels *The Communist Manifesto* (1847) dan *Capital: Critique of Political Economy* (1868), adalah model pembangunan ekonomi sosialis/komunis atau model pembangunan ekonomi yang seluruhnya dikuasai oleh negara. Model ini diadopsi dan dikembangkan oleh Eropa Timur di bawah pimpinan Russia dan karena itu kemudian lasim dikenal sebagai model pembangunan ekonomi sosialis Timur. Setelah Perang Dunia II berakhir tahun 1945, kedua model pembangunan ekonomi ini berkembang menjadi dua model ekonomi yang bertentangan satu sama lain. Pada waktu itu mereka berkompetisi untuk menarik negara-negara non-industri di Asia, Afrika dan Amerika Latin untuk mengadopsi salah satu dari kedua model pembangunan ekonomi ini – kapitalisme atau sosialisme/komunisme – sebagai kendaraan tunggal untuk mencapai kesejahteraan manusia.

Bagaimana ciri-ciri dan sekaligus unsur-unsur yang membedakan antara dua model pembangunan ekonomi yang saling berlawanan ini? Sankaran Krishna dalam karyanya *Globalization and Postcolonialism: Hegemony and Resistance in the Twenty-first Century* memberikan sebuah jawaban yang padat tentang hal ini:

Pada pertengahan abad kedua puluh, pada tingkat tataran teoritis, negara-negara ini [negara-negara yang baru merdeka dari penjajahan di Afrika, Asia dan negara-negara Amerika Latin yang secara formal merdeka

---

<sup>1</sup> Supaya bisa memahami pesan kenabian *Rerum Novarum*, penting untuk diketahui situasi dunia yang dihadapi oleh Leo XIII. Dunia pada masa itu ditandai oleh revolusi industri perubahan kehidupan sosial-ekonomi dan politik tak adil yang dibawahnya yang kurang lebih berlangsung antara tahun 1760 hingga 1830; Karl MARX dan Frederic ENGELS bereaksi terhadap ketidakadilan sosial ekonomi dan politik ini dengan menerbitkan *The Communist Manifesto* tahun 1847; Adam SMITH, yang disebut Karl Marx sebagai bapa yang melahirkan kapitalisme, menerbitkan *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* tahun 1776; dan Karl Marx meresponsnya dengan menerbitkan karyanya *Capital: Critique of Political Economy* tahun 1867.

tapi bergantung pada kekuasaan AS] dihadapkan dengan dua model pembangunan yang berlawanan satu sama lain. Model pertama adalah sebuah pembangunan menurut teori modernisasi, yaitu kapitalisme, yang didasarkan pada usaha ekonomi swasta pribadi, harus cukup terbuka terhadap investasi modal dan barang impor dari Barat di bawah model ekonomi perdagangan bebas, dan model ini melihat ekspansi perdagangan internasional dan investasi sebagai mesin bagi pertumbuhan ekonomi. Model pembangunan ini melihat investasi langsung yang diselenggarakan oleh pemerintah negara – seperti dalam bentuk perencanaan pembangunan ekonomi dan produksi – sebagai sebuah fase sementara saja, dan model ini harus segera ditinggalkan setelah mencapai sebuah konsolidasi tertentu. Model yang kedua adalah sebuah pembangunan ekonomi, yang diinspirasi oleh Uni Soviet, yang direncanakan oleh pemerintah pusat dari sebuah negara dan dipimpin oleh negara, dengan penekanan pada substitusi impor, tarif proteksionis dan kemandirian nasional terutama [kemandirian] barang-barang manufaktur. Model [yang kedua] ini bersikap pesimis terhadap pentingnya pertumbuhan ekspor, kompetisi [ekonomi] internasional dan investasi asing yang langsung dalam sebuah proses pembangunan.<sup>2</sup>

Dalam sejarah peradaban dunia selanjutnya, kedua sistem ekonomi ini, yang dipropagandakan sebagai model pembangunan di seluruh dunia, telah menjadi akar penyebab pelbagai konflik politik dan kekacauan ekonomi di negara-negara yang baru merdeka, peningkatan kemiskinan global dan degradasi alam lingkungan sejak akhir Perang Dunia II hingga hari ini. Sejak runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1990-an, hanya pembangunan model kapitalistik yang tetap bertahan dan secara diam-diam model pembangunan ini telah berubah menjadi sebuah model baru yang lasim disebut sebagai model pembangunan kapitalis neoliberal.<sup>3</sup> Dengan semua issue kunci ini sebagai latar belakang, karya tulis ini bertujuan untuk meninjau secara singkat konsep pembangunan sebagai sebuah proyek yang sengaja dirancang setelah Perang Dunia II oleh negara-negara industri bagi negara-negara non-industri di Asia, Afrika dan Amerika Latin dengan secara politik memaksakan salah satu dari dua model pembangunan ekonomi yang saling bertentangan ini. Lalu akan didemonstrasikan bagaimana Gereja Katolik sejak awal, melalui doktrin sosialnya, telah melakukan kritik kenabian terhadap kedua model pembangunan ini sambil mempromosikan hakikat pembangunan manusia yang lebih manusiawi, adil, otentik dan integral.<sup>4</sup>

## 1. Pembangunan Model Kapitalistik dan Agenda Tersembunyi

Pembangunan manusia, bersama dengan budaya dan jaringan interaksi sosialnya, sesungguhnya telah berlangsung sejak ribuan tahun lalu. Sejumlah ilmuwan bahkan berpendapat bahwa peradaban modern, yang dewasa ini ditandai oleh kesalingterkaitan tinggi

---

<sup>2</sup>KRISHNA Sankaran, *Globalization and Postcolonialism: Hegemony and Resistance in the Twenty-first Century* (New York, Toronto & Plymouth, UK: Rowman & Littlefield Publishers, 2009), p. 36.

<sup>3</sup>Sehubungan dengan pembangunan model kapitalistik ini, G erald Berthoud menulis: “Lebih dari empat decade sekarang, pembangunan saat ini dimengerti sebagai sebuah integrasi ke dalam pasar kapitalis nasional dan internasional. Integrasi ini pada gilirannya telah menjadi syarat bagi sebuah negara untuk dianggap telah maju (*developed*). Mengikuti logika pasar ini, relasi pada tingkat pribadi dan kolektif harus sama-sama berguna. Jika salah satu partner tidak memiliki sesuatu yang berguna untuk ditawarkan, maka partnernya yang lain tidak memiliki alasan untuk mempertahankan relasi yang tak seimbang ini dengan dia ... Negara-negara Dunia III sudah tidak lagi berada pada posisi relasi perdagangan yang menguntungkan dengan negara-negara kaya. Pembangunan melalui pasar ini, karenanya, merupakan sebuah proses selektif: hanya sektor-sektor ekonomi yang menjanjikan pertumbuhan ekonomi saja yang akan dipertimbangkan untuk dibangun.” Untuk informasi lebih lanjut lihat BERTHOUD G erald, “Market” in SACH Wolfgang (ed.), *The Development Dictionary: A Guide to Knowledge as Power* (London and New York: Zed Books, 2010), p. 75.

<sup>4</sup>Karena model pembangunan model sosialis/komunis sudah runtuh pada tahun 1990an, maka kritikan kenabian Gereja Kristen Katolik terhadapnya tidak perlu dipresentasikan di sini.

antara interaksi sosial dan ekonomi – yang kemudian disebut globalisasi – bukan merupakan satu hal yang baru sama sekali. Justin Jennings, misalnya, menyebutkan peradaban besar di Meksiko Tengah (500SM sampai 1500AD), Andes (1000SM sampai 1500AD), Mesopotamia (4000SM sampai 2000SM) dan Mesir (3500SM sampai 500SM ) sebagai contoh-contoh pertama dari globalisasi kebudayaan, ekonomi dan interaksi sosial manusia.<sup>5</sup> Peradaban kuno yang besar ini tidak mungkin tanpa sejumlah interkoneksi global walaupun modelnya tidak harus sama seperti melalui internet atau telepon dalam globalisasi modern dewasa ini. Nah, apa yang baru dari globalisasi modern, yang telah dimulai dengan zaman kolonialisme pada abad ke-15, adalah bahwa ekspansi besar interkoneksi manusia telah dipercepat oleh ilmu pengetahuan dan teknologi serta oleh nafsu pengejaran yang intens akan keuntungan ekonomi oleh kapitalisme liberal. Namun sebagai sebuah program yang sengaja diciptakan, konsep pembangunan ekonomi ini baru lahir pada masa setelah Perang Dunia II yang penuh dengan propaganda luhur tapi bukan tanpa agenda politik tersembunyi (*not without a hidden agenda*).

Seperti yang didokumentasikan oleh Arturo Escobar dalam karyanya *Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World*, Presiden AS Harry Truman merupakan orang pertama yang melahirkan ide tentang pembangunan. Dalam pidato pelantikannya pada 20 Januari 1949 yang kemudian dikenal sebagai Doktrin Truman, ia mengusulkan sebuah kebijakan supaya dunia menyiapkan strategi untuk membangun bangsa-bangsa yang dianggap masih terbelakang.<sup>6</sup> Truman bermaksud untuk menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk mereplikasi kemajuan dan perkembangan yang telah dicapai oleh negara-negara industri maju saat itu yang ditandai oleh tingginya tingkat industrialisasi dan urbanisasi, modernisasi teknik pertanian, pertumbuhan produksi barang material dan standar hidup yang cepat serta adopsi nilai-nilai pendidikan dan budaya modern secara luas. Dalam pandangan Truman, modal, ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan jalan agar mimpi Amerika akan perdamaian dan kemakmuran dapat merambat kepada semua bangsa di planet bumi ini.<sup>7</sup> Sepuluh tahun kemudian, Presiden John F. Kennedy, dalam pidato yang

---

<sup>5</sup>Untuk informasi lebih lanjut lihat JENNINGS Justin, *Globalizations and the Ancient World* (New York: Cambridge University Press, 2011), pp. 19-20.

<sup>6</sup> Ide untuk membangun negara-negara non-industri di belahan bumi Selatan memang sempat digulirkan dalam Konferensi Ekonomi di Bretton Woods pada tahun 1944 yang diusulkan oleh Amerika Latin. Walaupun ide ini ditaruh di bawah kaki oleh AS dan negara-negara industri lainnya saat itu, iden pembangunan tetap diambil dan dipakai sebagai nama asli dari Bank Dunia yakni IBRD (International Bank for Reconstruction and Development) yang artinya Bank Pembangunan Kembali dan Perbangunan. Maka jelas bahwa, pendirian bank ini pada tempat pertama tidak dimaksudkan untuk menolong pembangunan negara-negara non-industri yang pada waktu itu belum jelas nasibnya dibawah kuk penjajahan tapi terutama untuk membangun kembali ekonomi negara Eropa Barat yang hancur oleh Perang Dunia II. Baru pada tahun 1950-an, ketika sebagian koloni-koloni Eropa Barat di Asia dan Afrika satu persatu merdeka dan mulai mengamankan kekayaan alam mereka dari eksploitasi asing, ide pembangunan negara-negara non-industri digulirkan kembali, tapi kali ini ide pembangunan diusung dengan agenda tersembunyi sebagai satu bentuk baru dari kolonialisme – sebuah manifestasi baru dari kolonialisme selama 5 abad sebelumnya. Hingga tahun 1950 dunia sudah dibagi ke dalam dua blok yang saling bertentangan, kapitalisme liberal dan sosialisme/kommunisme, dan masing-masing blok berusaha menarik negara-negara non-industri ini ke dalam bloknya sambil berjanji untuk membangun ekonomi mereka dengan meminjam uang di negara-negara industri termasuk di Bank Dunia. Dengan ini, maka sejak saat itu, tanpa disadari oleh banyak orang, kecuali Sukarno, lahirlah perangkap utang luar negeri dari negara-negara non-industri. Sumber sejarah tentang politik ekonomi dunia yang kotor ini sangat banyak. Lihat misalnya PERKINS John, *Confessions of An Economic Hit Man* (Great Britain: Ebury Press, 2006).

<sup>7</sup>ESCOBAR Arturo, *Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1995), pp. 3-4.

disampaikan kepada majelis umum PBB, mengusulkan agar tahun 1960-an ditetapkan sebagai dekade pembangunan di mana baik negara-negara berkembang maupun negara-negara industri maju akan bersama-sama mengambil langkah-langkah yang serempak untuk membangun sebuah pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di seluruh dunia.<sup>8</sup>

Sejak pidato dari kedua presiden AS ini, praktisnya dunia telah dibagi ke dalam dua kategori: negara-negara maju (*developed countries*) yang identik dengan negara-negara industri dan kaya pada satu kelompok dan kelompok yang kedua adalah negara-negara terbelakang (*underdeveloped countries*) yang identik dengan negara-negara non-industri dan miskin, yang kemudian diperhalus menjadi kelompok negara berkembang (*developing countries*). Lalu berbagai program sosial dan ekonomi, yang sebagian besar dieksekusikan melalui Lembaga Bretton Woods – Bank Dunia, IMF dan GATT/WTO – dan Lembaga-Lembaga PBB yang lain (FAO dan UNCTAD) didirikan untuk membantu membangun negara-negara terbelakang supaya mereka juga bisa mencapai kemajuan dan kemakmuran ekonomi seperti yang telah diraih oleh negara-negara maju industri.<sup>9</sup> Akan tetapi, hasil dari proyek pembangunan yang dipropagandakan tahun 1960-an ini justru sebaliknya. Lebih buruk lagi, proyek pembangunan yang dipropagandakan ini ternyata bukan tanpa sebuah agenda tersembunyi (*not without a hidden agenda*).<sup>10</sup> Proyek pembangunan yang digulirkan negara-negara industri setelah Perang Dunia II tidak dibuat atas dasar ketulusan hati dan solidaritas sebagai satu keluarga umat manusia, tetapi pertama-tama karena ada agenda politik ekonomi yang tersembunyi. Selain itu, seperti yang dikritik oleh banyak pihak dewasa ini, konsep pembangunan yang lahir setelah Perang Dunia II sebenarnya merupakan sebuah lanjutan dari kolonialisme selama 5 abad sebelumnya.<sup>11</sup> Konsep pembangunan yang ditebarkan setelah Perang Dunia II merupakan sebuah cara yang cerdas tapi licik untuk membungkus sebuah bentuk baru kolonialisme (*a concept of development as a new form of colonialism*).<sup>12</sup>

Menurut Makere Stewart-Harawira, seorang profesor di bidang Studi Kebijakan di Universitas Alberta di Selandia Baru, akar dari agenda ekonomi politik ini dapat ditelusuri ke dalam perseteruan antara penguasa-penguasa Barat yang saling bersaing jauh sebelum

---

<sup>8</sup>MUSU Ignazio Prof and ZAMAGNI Stefano Prof., “Introduction” in PONTIFICAL COUNCIL FOR JUSTICE AND PEACE, *World Development and Economic Institutions* (Vatican City: Vatican Press, 1994), p. 7..

<sup>9</sup> Untuk informasi lanjut tentang bagaimana Bank Dunia meluncurkan berbagai program bagi negara-negara non-industri yang berjalan bersamaan dengan teori pembangunan yang digulirkan pada tahun 1950-an dan 1960-an, lihat MARQUETTE Heather, *Corruption, Politics and Development: The Role of the World Bank* (New York: Palgrave Macmillan, 2003), pp. 19-25 atau NORDVEIT Bjorn Harald, *Constructing Development: Civil Society and Literary in a Time of Globalization* (Hong Kong: Springer, 2009), pp. 5-6.

<sup>10</sup> RITZER George, *Globalization: A Basic Text* (Chichester, UK: Willey-Blackwell, 2010), p. 71.

<sup>11</sup> Untuk informasi lanjut, lihat NESTER William R., *Globalization, Wealth and Power in the Twenty-Fist Century* (New York: Pgrave Mcmillan, 2010), p. 146 dan RAPLEY John, *Understanding Development: Theory and Practice in the Third World* (London: Lynne Rienner Publishers Inc., 2007), pp. 1-62, atau GILPIN Robert, *Global Political Economy: Understanding the International Economic Order* (Princeton & Oxford: Princeton University Press, 2001), pp. 305-339.

<sup>12</sup> Tentang konsep pembangunan yang digulirkan sesudah Perang Dunia II sebagai topeng dari kolonialisme dalam bentuk baru, Arturo Escobar katakan: “Pembangunan bukan hanya merupakan sebuah alat kontrol ekonomi terhadap realitas sosial ekonomi dari bangsa Asia, Amerika Latin dan Afrika. Ia juga merupakan sebuah penemuan baru (*an invention*) dan sebuah strategi baru (*a new strategy*) yang diciptakan oleh Negara Dunia I tentang pembangunan negara-negara Dunia III.” Informasi lanjut, lihat ESCOBAR Arturo, “Imagining a Post-Development Era,” dalam EDELMAN Marc and HAUGERUD Angelique, *The Anthropology of Development and Globalization: From Classical Political Economy to Contemporary Neoliberalism* (Oxford, UK & Victoria, Australia, 2005), p. 342.

Perang Dunia II meletus, yang pada dasarnya merupakan perang antara negara-negara industri yang sedang berebutan wilayah-wilayah lain dari planet bumi ini untuk kepentingan eksploitasi ekonomi. Dalam bukunya *The New Imperial Order: Indigenous Response to Globalization*, Stewart-Harawira menulis:

Pada mulanya, para pihak yang bersaing atas bentuk dan sifat dari tata ekonomi multilateral yang dipimpin negara-negara Barat adalah Jerman dan negara-negara Barat lainnya yang diwakili oleh Inggris dan Amerika Serikat. Usulan Jerman untuk sebuah tatanan ekonomi baru diumumkan pertama kali pada tahun 1940. Di Inggris, perdebatan mengenai sistem ekonomi dunia baru berlangsung antara kelompok ahli ekonomi liberal yang pada intinya menganjurkan penghapusan semua hambatan perdagangan [internasional] di satu pihak dan di pihak lain kelompok ahli ekonomi yang mendukung pendekatan konservatif yang dimotori John Meynard Keynes dan mitranya dari AS, Harry Dexter White, di mana keduanya telah menjadi tokoh terkemuka yang menentang sistem liberalisme keuangan pada 1930-an. Akan tetapi, di dunia seberang Atlantik lainnya, lembaga-lembaga final untuk tata dunia pasca-perang [Dunia II] telah didahului oleh serangkaian studi yang dilakukan antara tahun 1939 dan 1945 oleh CFR [*Council for Foreign Relations* /Dewan Perhubungan Luar Negeri] .... Dalam arti yang luas, Sistem Bretton Woods [tata ekonomi dunia baru yang didirikan pada tahun 1944] dibuat dengan didasarkan pada kombinasi ideologi-ideologi internasional yang liberal dan Makroekonomi Keynesian. Dilembagakan dalam pengaturan mata uang yang stabil, didukung oleh IMF dan Bank Dunia dan dijamin oleh defisit AS, *fokus dari pengaturan ini pada waktu itu adalah pembangunan nasional dari negara-negara [Asia, Afrika dan Amerika Latin], pembukaan wilayah-wilayah bagi akses ekonomi dan rekonstruksi dan integrasi ekonomi internasional di bawah hegemoni Amerika* [huruf miring di sini berasal dari saya].<sup>13</sup>

Dalam bahasa yang digunakan Arturo Escobar, agenda rahasia dari negara-negara industri di balik konsep pembangunan yang mereka gulirkan untuk membangun negara-negara non-industri setelah Perang Dunia II sangat jelas. Supaya bisa memahami persoalan ini secara lebih baik, sebuah kutipan langsung yang agak pajang dari Escobar dipandang perlu:

Periode tahun 1945 hingga 1955 menyaksikan terjadinya konsolidasi hegemoni Amerika Serikat dalam sistem kapitalis dunia. Kebutuhan untuk mengekspansi dan memperdalam pasar bagi produk-produk Amerika Serikat di luar negeri, serta kebutuhan untuk menemukan tempat-tempat baru untuk investasi modal Amerika Serikat yang surplus, menjadi semakin mendesak selama tahun-tahun ini. Ekspansi ekonomi Amerika Serikat membutuhkan akses bahan-bahan baku murah untuk mendukung kapasitas industrinya yang sedang bertumbuh, terutama sehubungan dengan perusahaan-perusahaan multinasionalnya yang baru lahir. Salah satu sektor ekonomi yang menjadi semakin nampak selama periode ini [1945-1955] adalah perubahan dari produksi industri (*industrial production*) ke produksi bahan pangan (*production of foods*) dan bahan-bahan baku industri, yang kemudian mengorbankan produksi bahan pangan, yang menunjuk ke arah perlunya sebuah program yang efektif untuk mendorong produksi primer di negara-negara terkebelakang. Namun pada waktu itu, perhatian utama periode ini adalah revitalisasi ekonomi Eropa [dari kehancuran karena Perang Dunia II]. Maka sebuah program bantuan ekonomi yang besar bagi Eropa Barat dilakukan dan mencapai puncaknya dengan mendirikan apa yang disebut *Marshall Plan* pada tahun 1948 .... Negara-negara Dunia Ketiga kala itu tidak mendapat perlakuan yang sama. Dibandingkan dengan US\$19 miliar [dari Marshall Plan] yang diterima oleh Eropa, kurang dari 2% dari total paket bantuan AS ini, misalnya, didapat oleh negara-negara Amerika Latin, hanya US\$150 juta didapat oleh seluruh negara Dunia Ketiga .... Negara-

---

<sup>13</sup> STEWART-HARAWIRA Makere, *The New Imperial Order: Indigenous Responses to Globalization* (London & New York: Zed Books / Wellington: Huian Publishers, 2005), pp. 97-99; lihat juga KRISHNA Sankaran, *Globalization and Postcolonialism: Hegemony and Resistance in the Twenty-first Century* (New York, Toronto & Plymouth, UK: Rowman & Littlefield Publishers, 2009). Dalam buku ini Krishna dengan sangat jelas memperlihatkan link antara kolonialisme dari tahun 1500 sd 1900 dan postkolonialisme yang ditandai oleh dibentuknya Tata Ekonomi Dunia Baru (the New World Economic Order) sesudah Perang Dunia II, yang diikuti oleh propaganda modernisasi atau proyek-proyek pembangunan pada tahun 1950s hingga 1960-an dan akhirnya neoliberalisme global saat ini.

negara Dunia Ketiga diperintahkan untuk melirik pinjaman modal swasta, baik modal swasta domestik maupun asing, yang berarti "kondisi khusus" [penekanan asli dari pengarang] harus diciptakan, *termasuk komitmen* [dari negara-negara Dunia Ketiga sebagai peminjam] *untuk menerima model pembangunan ekonomi kapitalis; pengekan semangat nasionalisme, pengontrolan terhadap haluan Kiri* [para pengusung pembangunan model sosialis/komunis], *kelas kaum buruh dan kaum tani* [penekanan dengan huruf miring adalah dari saya] ... Tanpa diragukan lagi, Perang Dingin merupakan salah satu faktor paling penting yang berperan dalam strategi pembangunan. Akar sejarah dari konsep pembangunan dan pertikaian politik Timur versus Barat terletak pada satu hal yang sama: tatanan politik yang terjadi setelah Perang Dunia II. Pada akhir tahun 1940-an, pertikaian nyata antara Timur [pembangunan dengan model ekonomi sosialis/komunis pimpinan Uni Soviet] dan Barat [pembangunan model ekonomi kapitalis Eropa Barat-AS] sudah berpindah tempat ke negara-negara Dunia Ketiga, *dan ide tentang pembangunan menjadi sebuah strategi baru yang dipertaruhkan* [penekanan dengan huruf miring di sini adalah dari saya] dalam pertikaian tersebut dan, pada saat yang sama, mendesain peradaban manusia berbasis industri.<sup>14</sup>

Lebih buruk lagi, proyek-proyek pembangunan yang dipropagandakan pada tahun 1950-an hingga tahun 1960-an yang diperuntukkan bagi negara-negara non-industri direncanakan secara rahasia oleh organisasi-organisasi perusahaan pelobi (*corporate lobbying organizations*). Setelah pembentukan tata ekonomi dunia baru pada pertengahan tahun 1940-an, yang ditandai dengan pembentukan IMF, Bank Dunia dan GATT/WTO, pada tahun 1950-an sejumlah organisasi perusahaan pelobi yang sifatnya rahasia mulai didirikan tanpa diketahui oleh publik. Mereka adalah, antara lain, Bilderberg, Kamar Dagang International (ICC, *International Chamber of Commerce*), Forum Ekonomi Dunia (*World Economic Forum*) dan Komisi Trilateral (*Trilateral Commission*). Organisasi-organisasi perusahaan pelobi ini secara rahasia merencanakan dan mengatur arah ekonomi dunia dan pembangunan dari negara-negara non-industri dengan pembangunan model ekonomi kapitalis sesuai dengan kepentingan ekonomi mereka sendiri. Mengenai organisasi perusahaan pelobi Bilderberg Group, misalnya, Belen Balanya dkk dalam karya mereka *Europe Inc.: Regional and Global Restructuring and the Rise of Corporate Power* menulis:

Kelompok [perusahaan pelobi] Bilderberg adalah salah satu kelompok organisasi perusahaan internasional yang tertua dan paling sulit diinfiltrasi di mana di dalamnya perusahaan-perusahaan besar memainkan peranan penting untuk menyusun agenda [pembangunan ekonomi internasional khususnya bagi negara-negara Dunia Ketiga]. Sebuah usaha untuk memuluskan dan memantapkan hubungan trans-atlantik antara Amerika Serikat dan Eropa Barat pasca-perang [Dunia II], pertemuan pertama Bilderberg yang mempertemukan para politisi, ahli strategi militer, para bankir, para pemimpin bisnis, para akademisi, media, wakil anggota serikat buruh dan lain-lain terjadi pada tahun 1954 di Hotel Bilderberg di Oosterbeek, Belanda. Pertemuan awal ini meliputi isu-isu mulai dari *masalah ancaman Komunis hingga pembangunan Dunia Ketiga*, integrasi Eropa dan kebijakan ekonomi [penekanan dengan huruf miring berasal dari saya].<sup>15</sup>

Kalau orang ingat semua hal ini, maka bukan sesuatu yang berlebihan kalau Presiden Soekarno mencap tata ekonomi dunia baru yang didirikan setelah Perang Dunia II sebagai sebuah bentuk baru dari kolonialisme, yang dengan cara licik berusaha melanjutkan eksploitasi ekonomi dari Indonesia dan dari negara-negara non-industri lainnya. Sukarno berjuang habis-habisan untuk melindungi perekonomian Indonesia – sumber-sumber daya

---

<sup>14</sup>ESCOBAR Arturo, *Encountering Development*, Ibid., pp. 32-34 atau ESTEVA Gustavo, "Development," dalam SACH Wolfgang (ed.), *The Development Dictionary: A Guide to Knowledge as Power* (New York: Zed Books, 2010), pp. 1-21.

<sup>15</sup>BALANYÁ Belèn, DOHERTY Ann, MA'ANIT Olivier Hoedeman Adam and WESSELIUS Erik, *Europe Inc.: Regional and Global Restructuring and the Rise of Corporate Power* (London & Sterling, VA: Pluto Press, 2003), p. 145.

alamnya –antara lain dengan menolak pinjaman yang ditawarkan oleh IMF yang ia dipandang sebagai sebuah perangkat belaka atau sebuah topeng kolonialisme dalam bentuk baru.

## 2. Pembangunan Model kapitalistik dan Mitosnya

Apakah proyek-proyek pembangunan yang direncanakan tahun 1950-an oleh negara-negara industri untuk negara-negara Dunia Ketiga mencapai tujuannya sebagaimana yang digembar-gemborkan oleh para pendukungnya yaitu, untuk membuat mereka menjadi negara industri dan dengan itu mencapai kesejahteraan? Jawabannya adalah sama sekali tidak. Karena fakta menunjukkan bahwa proyek-proyek pembangunan itu dirancang dengan agenda politik tersembunyi, maka negara-negara miskin non-industri malah menjadi semakin lebih miskin. Mimpi pembangunan telah berubah menjadi mimpi buruk bagi mereka, seperti kata Arturo Escobar:

Buku ini bercerita tentang mimpi ini [rencana membangun negara-negara Dunia Ketiga untuk menjadi negara industri dan makmur seperti Eropa dan Amerika Utara] dan bagaimana mimpi itu telah semakin berubah menjadi sebuah mimpi buruk. Karena alih-alih mereka menjadi bangsa yang berkelimpahan seperti yang dijanjikan oleh para ahli teori ekonomi dan politisi negara industri pada tahun 1950-an, wacana dan strategi pembangunan yang digulirkan kala itu justru membuahkan hal-hal yang sebaliknya: keterbelakangan dan pemiskinan yang masif, eksploitasi dan penindasan yang tak bisa dihitung. Krisis utang, ...kemiskinan dunia yang terus meningkat, masalah kekurangan gizi, dan kekerasan merupakan beberapa tanda patetik yang paling menyedihkan dari kegagalan pembangunan selama empat puluh tahun. Dengan demikian, buku ini [bagian ini dari buku Arturo Escobar adalah bab 1 dengan subjudul "Pendahuluan: Pembangunan dan Antropologi Modernitas"] dapat dibaca sebagai sejarah kehilangan dari sebuah ilusi, di mana banyak orang semula memercayainya secara tulus. Di atas semuanya itu, buku ini berbicara tentang bagaimana "Dunia Ketiga" telah diciptakan oleh wacana dan praktik pembangunan sejak awal kelahiran mereka sebagai negara bangsa setelah Perang Dunia II berakhir.<sup>16</sup>

Semakin buruk lagi, proyek pembangunan yang secara historis lahir di panggung dunia antara akhir tahun 1940-an sampai akhir tahun 1970-an juga telah diganti secara diam-diam dan rahasia oleh apa yang sekarang dikenal sebagai sistem ekonomi neoliberal dengan semua masalah yang ditimbulkannya bagi umat manusia dan keutuhan alam ciptaan. Oswaldo de Rivero, seorang mantan diplomat Peru, mengatakan bahwa kapitalisme neoliberal global saat ini telah mewajibkan negara-negara berkembang merangkul sistem ekonomi neoliberal, di mana sebagian besar dari mereka tidak akan mampu bertahan dalam persaingan ekonomi pasar bebas dan akan didesak ke pinggir oleh perkembangan teknologi dan ekonomi kapitalis global yang beroperasi menurut hukum rimba dari Charles Darwin.<sup>17</sup> Rivero lebih lanjut mengatakan bahwa banyak negara telah secara keliru disebut "negara berkembang" karena fakta sesungguhnya menunjukkan mereka tidak sedang berkembang. Sebaliknya mereka telah jatuh ke dalam status sebagai negara-negara dengan ekonomi nasional yang gagal alias rapuh (*non-viable national economies*). Bagi mereka, ide pembangunan yang digulirkan sejak Perang Dunia II berakhir telah menjadi sebuah mitos. Menurut Arturo, negara-negara ini

---

<sup>16</sup>ESCOBAR Arturo, *Encountering Development*, Ibid., p. 4.

<sup>17</sup>DE RIVERO Oswaldo, *The Myth of Development: The Non-Viable Economies of the 21st Century* (New York: Zed Books: Books for Change, 2001), p. 5.

telah menyia-nyiakan seluruh waktu pada abad XX ini tanpa mencapai hasil pembangunan<sup>18</sup> seperti yang dimimpikan pada tahun 1950-an dan 1960-an.

Sehubungan dengan kegagalan pembangunan ini, pada tahun 1980-an Gustavo Gutierrez juga sudah memberi catatan kritis bahwa proyek pembangunan dengan agenda tersembunyi yang dipropagandakan oleh negara-negara industri telah membuat negara-negara miskin Amerika Latin perlahan-lahan menyadari bahwa keterbelakangan mereka merupakan buah sampingan (*by-product*) dari perkembangan negara-negara lain karena sebuah relasi [tidak adil] yang ada antara negara-negara kaya dan negara-negara miskin. Maka menurut Gutierrez, pembangunan di negara-negara Amerika Latin saat ini seharusnya juga merupakan sebuah usaha membebaskan diri dari sebuah politik ekonomi dengan agenda terselubung dari negara-negara adidaya. Karena itu, kata Gutierrez lebih lanjut, pembangunan harus pertamanya menyerang akar-akar penyebab dari masalah keterbelakangan dan akar penyebabnya yang paling dalam adalah kebergantungan sosial ekonomi dan politik dari negara-negara berkembang pada negara-negara kaya secara teknologis. Hanya setelah pembebasan dari ketidakadilan struktural ini, barulah sebuah kebijakan ekonomi yang otentik dapat diimplementasikan secara efektif.<sup>19</sup>

Hingga di sini, pertanyaan bagi Gereja sebagai lembaga kenabian yang membebaskan adalah di mana Gereja di tengah seluruh drama ketidakadilan sosial, ekonomi dan politik ini? Apa yang Gereja telah suarakan dan ajarkan tentang sebuah sistem ekonomi dunia yang telah menjadi tragedi bagi sebagian besar penduduk dunia saat ini dan telah menjadi berkah hanya untuk segelintir orang? Jawabannya adalah bahwa Gereja telah selalu berada di tengah-tengah tragedi manusia yang disebabkan oleh struktur-struktur sosial-ekonomi dan politik tak adil. Gereja telah selalu bersikap konsisten sehubungan dengan pandangannya tentang martabat pribadi manusia, ekonomi, pembangunan, politik dan alam ciptaan dan bagaimana semua hal ini seharusnya dikelola oleh masyarakat manusia dengan hati-hati dan secara bijaksana demi kepentingan seluruh umat manusia sebagai satu keluarga dan bukan hanya untuk kepentingan segelintir orang.

Akan tetapi, dalam menjalankan misi kenabiannya di tengah-tengah pelbagai masalah dunia, penting untuk dicatat bahwa Gereja pada prinsipnya tidak menentang pembangunan dan globalisasi *per se* sebagai sebuah proses yang sengaja direncanakan oleh manusia.<sup>20</sup> Juga Gereja tidak menentang setiap tatanan sosial, ekonomi dan politik dunia. Demikian juga Gereja tidak menentang politik dari setiap negara manapun di seluruh dunia. Seperti para penganalisis lain terhadap pembangunan dan globalisasi, khususnya globalisasi di bidang ekonomi yang dikenal sebagai sistem ekonomi neoliberal global saat ini, yang masih mempunyai kesadaran moral kuat karena diinspirasi oleh nilai-nilai universal seperti cinta

---

<sup>18</sup>Ibid., pp. 9-10.

<sup>19</sup> GUTIERREZ GUSTAVO, *A Theology of Liberation*, 15<sup>th</sup> Anniversary Edition (Maryknoll, New York City, NY: Orbis Books, 1988), p. 17.

<sup>20</sup>Sebagai sebuah rencana yang dibuat manusia, Eric Cazdyn dan Imre Szeman, misalnya, berargumentasi: "Globalisasi [khususnya di sektor ekonomi] sejak awal merupakan sebuah proyek ideologi yang digunakan menaturalisasi kapitalisme. Globalisasi membuat kapitalisme tak kelihatan (*invisible*) yang berada di balik perubahan-perubahan yang dilihat sebagai hal-hal alamiah di mana tanpa hal-hal alamiah ini, termasuk kapitalisme global maka manusia tidak bisa berbuat apa-apa." Lihat CAZDYN Eric & SZEMAN Imre, *After Globalization* (Chichester, UK: Willey-Blackwell Publisher, 2011), p. 1.

(*love*), keadilan (*justice*), kepentingan umum (*common good*) dan persaudaraan (*fraternity*), Gereja Katolik melalui ajaran sosialnya akan bangkit berdiri menentang setiap aktivitas atau gagasan pembangunan (*a notion of development*) yang merusak martabat pribadi manusia (*the dignity of the human person*), kesejahteraan umum (*common good*) dan keberlanjutan dari alam penciptaan (*sustainability of creation*).

Gereja Katolik dalam kerja sama dengan semua orang yang berkehendak baik memiliki misi kenabian yang membebaskan yang diamanatkan oleh Allah yang penuh kasih dan adil untuk mengecam setiap struktur sosial dan ekonomi yang tidak adil dan gagasan yang tidak lengkap mengenai pembangunan. Gereja selalu secara profetis menyerukan sebuah pembangunan yang adil, yang lebih humanistik dan integral yang tujuannya harus terutama untuk melayani kebutuhan manusia, baik material maupun spiritual, dan menghormati martabat pribadi manusia dan memelihara keutuhan alam ciptaan sebagai tempat di mana semua umat manusia, apapun suku, agama dan bangsanya, bergantung secara mutlak untuk keberlangsungan hidupnya. Agar semua harapan ini terwujud, maka pembangunan, termasuk pembangunan di bidang ekonomi, mesti diatur dan dipandu oleh etika cinta (*ethics of love*), keadilan (*justice*), kesetaraan (*equality*), solidaritas (*solidarity*) dan persaudaraan (*fraternity*).

### **3. Peringatan Profetis Gereja Terhadap Pembangunan Model Kapitalistik**

Sejak peluncuran gagasan pembangunan pada tahun 1950-an dan 1960-an, Gereja Katolik selalu responsif terhadap isu pembangunan. Selain itu, Gereja selalu dalam posisi mendukung pembangunan, tetapi akan menentang setiap pembohongan dan penerapan sistem atau model ekonomi yang tidak adil dalam proses mencapai tujuan pembangunan. Respon dan dukungan dari Gereja sehubungan dengan konsep pembangunan yang mulai bergulir pada tahun 1950-an dapat dilihat dengan jelas dalam *Gaudium et Spes* – salah satu dokumen dari Konsili Vatikan Kedua (1962-1965) dan dalam ensiklik paus yang diterbitkan selama periode ini seperti *Mater et Magistra* (1961) dan *Populorum Progressio* (1967).

Berbeda dengan dua ensiklik yang juga berbicara tentang masalah sosial ekonomi dan politik dunia yang diterbitkan dalam dekade sebelumnya seperti *Rerum Novarum* (tentang Modal dan Kaum Buruh) dari Leo XIII (1891) dan *Quadragesimo Anno* (tentang Pembangunan Kembali Tatanan Sosial) dari Pius XI (1931), *Mater et Magistra* dari Yohanes XXIII (1961) untuk pertama kali mulai berbicara tentang soal-soal seperti prinsip subsidiaritas<sup>21</sup> dalam isu-isu pembangunan, pembangunan ekonomi yang tidak seimbang dari setiap bangsa<sup>22</sup> dan mengenai hubungan yang tidak seimbang antara dua kelompok masyarakat politik internasional, yaitu antara kelompok negara yang secara ekonomis sangat maju dan kelompok negara yang masih dalam proses mengejar kemajuan.<sup>23</sup> Itu berarti bahwa Gereja pada waktu itu – selama dua dekade setelah Perang Dunia II berakhir – telah melihat hubungan yang tidak adil sedang terjadi di antara negara-negara industri yang secara ekonomis sangat kuat dan negara-negara berkembang yang ekonominya masih lemah, dan Gereja telah sangat prihatin dengan situasi ini.

---

<sup>21</sup>JOHN XXIII, Encyclical Letter *Mater et Magistra* (Rome, 15<sup>th</sup> of May, 1961), No. 117.

<sup>22</sup>Ibid., No. 128-130.

<sup>23</sup>Ibid., No. 157.

Enam tahun kemudian, dalam ensiklik *Populorum Progressio* (1967) yang artinya Pembangunan Masyarakat Manusia, Paulus VI lebih lanjut berbicara secara panjang lebar mengenai topik tentang pembangunan manusia dengan segala permasalahan dan prospek-prospeknya. Sejak kelahiran dari pembangunan model kapitalistik liberal pada tahun 1950-an hingga tahun 1960-an, Gereja telah menyadari hakikat ketidakberesan atau karakter curang (*fraud*), karakter tidak adil dan kekerasan (*unjust and violent character*) dari model pembangunan kapitalistik liberal yang sedang digulirkan ini dan Gereja tidak melewatkan kesempatan untuk memberikan peringatan serta kritik-kritik sejak dini seperti hal-hal sehubungan dengan: a) opodidi kapitalisme liberal terhadap peran negara di bidang ekonomi; b) ketidakadilan persaingan bebas di bidang ekonomi seturut teori kapitalisme liberal; dan c) ilusi pertumbuhan ekonomi tanpa batas secara eksponensial seturut teori kapitalisme liberal.

### **Tentang Oposisi Kapitalisme Liberal Terhadap Peran Negara di Bidang Ekonomi**

Menanggapi kecenderungan kapitalisme liberal yang menolak setiap peran negara di bidang ekonomi dan menjagokan ideologi ekonomi perusahaan swasta dengan kebebasan usaha tanpa batas, Yohanes XXIII dalam *Mater et Magistra* (1961) dan Benediktus XVI dalam *Caritas in Veritate* (2009) menggarisbawahi peran unik dari pemerintah negara di bidang ekonomi. John XXIII dan Benediktus XVI masing-masing menulis:

Alasan keberadaan negara (*the state's raison d'etre*) adalah untuk merealisasikan kepentingan umum yang ditata oleh pemerintahan duniawi. Karena itu, ia [pemerintah negara] tidak bisa menjauhkan diri dari urusan pembangunan ekonomi. Sebaliknya, ia harus melakukan segalanya seturut kekuasaan yang ada padanya untuk mempromosikan produksi barang-barang material secara cukup ... Pemerintah negara juga memiliki tugas untuk melindungi hak-hak dari semua rakyatnya, dan khususnya para anggota warga negaranya yang lemah, para kaum buruh, kaum perempuan dan anak-anak. Tidak akan pernah dibenarkan kalau pemerintah negara menghindari kewajibannya untuk bekerja secara aktif demi kemajuan kondisi para pekerja.<sup>24</sup>

"*Otoritas politik*" juga melibatkan *berbagai macam nilai* [huruf miring adalah asli dari Paus] yang tidak boleh diabaikan dalam proses membangun sebuah tatanan baru produktivitas ekonomi... Kita mesti mempromosikan sebuah kekuasaan politik yang merata dan efektif pada tingkat yang berbeda-beda. Ekonomi terpadu dewasa ini tidak membuat peran pemerintah negara berlebihan, melainkan ia berkomitmen agar pemerintah negara berkolaborasi secara lebih besar satu sama lain. Kita perlu bijaksana dan hati-hati untuk tidak dengan gegabaha mengumumkan kematian pemerintah negara. Sehubungan dengan resolusi krisis saat ini, peran negara tampaknya akan bertumbuh kembali, karena ia mendapatkan kembali kompetensi-kompetensinya. Apalagi di beberapa negara, pembangunan atau pembagunan kembali sebuah negara tetap menjadi faktor kunci dalam perkembangan mereka ... Negara tidak harus memiliki karakteristik yang sama di mana-mana: dukungan yang dibuat untuk memperkuat sistem konstitusional yang lemah dapat dengan mudah disertai dengan pengembangan pemain-pemain politik lainnya, yang bersifat kultural, sosial, teritorial atau religius, di samping negara.<sup>25</sup>

Sudah sejak awal pembangunan model kapitalistik liberal yang digulirkan oleh para pendukungnya pada tahun 1950-an hingga tahun 1960-an, Gereja sudah melihat bahaya dari pelucutan total peran pemerintah negara di bidang ekonomi. Salah satu dari sekian banyak bahaya yang dilihat dan diperingatkan Gereja adalah bahwa kalau seluruh kekuasaan

---

<sup>24</sup>JOHN XXIII, *Ibid.*, NO. 20.

<sup>25</sup>BENEDICT XVI, Encyclical Letter *Veritas in Caritate* (Rome, 29<sup>th</sup> of June 2009), No. 41.

negara untuk mengatur ekonomi dihapus maka besar kemungkinan seluruh ekonomi akan jatuh ke tangan segelintir orang kaya. Lalu pada gilirannya ekonomi di tangan segelintir orang kaya ini bisa menjadi sebuah tirani dalam bentuk bentuk baru yang sangat menindas, eksploitatif dan memiskinkan sebahagian besar warga masyarakat di setiap negara atau masyarakat seluruh dunia pada umumnya seperti yang sudah terjadi dewasa ini dengan regim kapitalisme neoliberal yang sudah mengglobal. Menyadari akan adanya bahaya tirani kapitalisme liberal ini, Yohanes XXIII (50 tahun yang lalu) dalam ensikliknya *Mater et Magistra* (1961) sudah memperingatkan masyarakat dunia akan bahaya plutokrasi (*plutocracy*) – yakni kedaulatan dan kekuasaan negara yang jatuh ke dalam tangan segelintir orang kaya – sebagai salah satu buah buruk yang bisa terjadi dari model pembangunan kapitalistik liberal yang pada dasarnya ingin menolak secara total setiap peran pemerintah negara dalam pembangunan ekonomi. Tentang hal ini Yohanes XXIII menulis:

Kompetisi [ekonomi] tanpa regulasi telah menyerah pada kecenderungan-kecenderungan yang melekat dalam dirinya hingga ke titik yang secara praktis bisa menghancurkan dirinya sendiri. Ia [kompetisi ekonomi tanpa regulasi] telah menimbulkan sebuah akumulasi kekayaan secara besar-besaran, dan, dalam prosesnya, ia memusatkan *sebuah kekuasaan ekonomi yang kejam di dalam tangan segelintir orang ....* Ambisi tanpa kendali untuk menguasai telah menghasilkan keinginan untuk [meraup] keuntungan; rezim ekonomi secara keseluruhan telah menjadi sangat kejam dan tak kenal lelah dalam takaran yang menakutkan. Sebagai akibatnya, bahkan *otoritas publik* [pemerintah negara] *menjadi alat di tangan plutokrasi* [diperintah oleh segelintir orang kaya], sehingga mereka memperoleh instrumen untuk mencengkram seluruh dunia [Huruf miring di sini adalah dari saya].<sup>26</sup>

Sebagai solusi utama untuk ketidakadilan sosial-ekonomi dan politik yang tertanam dalam sistem kapitalisme liberal, Yohanes XXIII menyerukan supaya ekonomi dunia ditata kembali dengan diberi bingkai moral dan subordinasi kepentingan ekonomi individu dan kelompok (*subordination of individual and group interests*) di atas kepentingan umum (*the interests of the common good*). Pemerintah negara harus melaksanakan tugas utama untuk mempromosikan kebaikan bersama bagi semua orang (*to promote the common good of all*) dan harus ada kerjasama ekonomi internasional untuk mencapai kesejahteraan ekonomi semua bangsa.<sup>27</sup> Dalam rangka membangun sebuah tata ekonomi yang adil, Yohanes XXIII selanjutnya menjabarkan dua prinsip penting bagi masyarakat dunia: mengakhiri persaingan ekonomi tanpa regulasi dan perlu ada keseimbangan antara sektor ekonomi publik dan sektor ekonomi swasta. Tentang hal ini Yohanes XXIII lebih lanjut menulis:

Pertama, ia [ekonomi] tidak boleh menjadi sebuah interese khusus dari individu-individu atau kelompok, atau kompetisi yang tanpa kendali, despotisme (kelaliman) ekonomi, prestise nasional atau imperialisme, maupun tujuan lain yang semacam ini. Sebaliknya, semua bentuk usaha ekonomi harus diatur oleh prinsip keadilan sosial dan amal kasih. Hal kedua yang kami anggap sangat dasariah ... adalah... bahwa tujuan [ekonomi] manusia adalah untuk mencapai sebuah tata hukum nasional dan internasional yang berkeadilan sosial, *dengan jaringan lembaga-lembaga publik dan swasta, di mana semua aktivitas ekonomi dapat dilakukan bukan hanya untuk kepentingan pribadi tetapi juga untuk kepentingan umum* [huruf miring di sini adalah dari saya].<sup>28</sup>

*Gaudium et Spes* dari Konsili Vatikan II meneruskan gagasan Yohanes XXIII bahwa pembangunan ekonomi seharusnya tidak boleh dikontrol dan dikuasai oleh segelintir

---

<sup>26</sup>JOHN XXIII, Encyclical Letter *Mater et Magistra*, Ibid., No. 35-36.

<sup>27</sup>Ibid., No. 37..

<sup>28</sup>Ibid., No. 38-40.

organisasi ekonomi – seperti perusahaan-perusahaan transnasional – atau oleh segelintir negara adidaya yang menganut sistem kapitalisme liberal atau juga sebaliknya tidak boleh dikontrol dan dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah negara seperti yang terjadi dengan sistem ekonomi sosialis/komunis:

Pembangunan ekonomi harus tetap berada di bawah control manusia dan *tidak boleh diserahkan untuk diputuskan hanya oleh segelintir orang atau kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi yang sangat besar atau hanya oleh masyarakat politik atau oleh negara-negara adidaya tertentu. Sebaliknya, ...pada setiap tingkat sebanyak mungkin orang* dan, pada tingkat hubungan internasional, semua bangsa harus mempunyai sebuah andil yang aktif dalam menentukan arah pembangunan. Juga perlu koordinasi dan kombinasi yang pas dan harmonis dari usaha-usaha [ekonomi] pribadi (swasta) dan kelompok dengan usaha-usaha [ekonomi] dari pemerintah negara. *Pertumbuhan [ekonomi] tidak bisa dibiarkan begitu saja dikuasai oleh semacam mekanisme aktivitas ekonomi pribadi [swasta] atau [seluruh ekonomi dikuasai] oleh pemerintah negara [huruf miring di sini adalah dari saya].* Karena alasan ini, doktrin-doktrin yang menghambat reformasi yang diperlukan di bawah kedok kebebasan palsu, dan orang-orang yang merendahkan hak-hak asasi pribadi manusia dan kelompok di hadapan organisasi produksi kolektif merupakan sesuatu yang keliru.<sup>29</sup>

Dalam *Deus Caritas Est* (2005) Benediktus XVI tidak banyak berbicara secara langsung tentang masalah yang diakibatkan oleh ekonomi pasar bebas tanpa kendali (*unconstrained free market economy*). Tapi ia berbicara tentang peran penting negara dalam sebuah pembangunan masyarakat yang adil. Dia, misalnya, menulis: "Perjuangan untuk meraih keadilan harus menjadi sebuah norma fundamental dari pemerintah negara dan bahwa tujuan dari sebuah tatanan sosial yang adil adalah untuk menjamin hak setiap orang ... untuk mendapat bagian yang menjadi miliknya dari harta kekayaan bersama."<sup>30</sup> Dalam *Encyclical Caritas in Veritate* (2009) Benediktus XVI juga menggarisbawahi peran penting negara dalam membangun sebuah masyarakat yang adil, dan dengan keras mengkritik ide palsu dari sistem ekonomi pasar yang mengklaim bahwa ia bisa mengatur diri sendiri (*the false notion of self-regulating market economy*) dan ide pendukung ekonomi pasar bebas untuk menolak secara total setiap intervensi pemerintah negara di sektor ekonomi. Tentang hal ini Benediktus XVI menulis:

Ajaran sosial Gereja telah tak henti-hentinya menyoroti pentingnya *keadilan distributif* dan *keadilan sosial* [huruf miring adalah asli dari Paus] untuk ekonomi pasar, bukan hanya karena ia merupakan milik dari sebuah konteks sosial dan politik yang lebih luas, tetapi juga karena jaringan relasi yang lebih luas di mana ia beroperasi. Bahkan, jika pasar diatur sendiri oleh prinsip kesetaraan dari nilai barang-barang yang dipertukarkan, ia tidak dapat menghasilkan kohesi sosial yang ia butuhkan agar dapat berfungsi dengan baik .... Pandangan bahwa ekonomi pasar mempunyai sebuah kebutuhan akan adanya kuota kemiskinan (*a quota of poverty*) dan keterbelakangan (*underdevelopment*) supaya [ekonomi] bisa berfungsi dengan baik merupakan sebuah pandangan keliru. Ekonomi pasar seharusnya mempromosikan emansipasi, tetapi supaya hal itu bisa dilakukan secara efektif, ia [ekonomi pasar] tidak bisa mengandalkan hanya pada dirinya sendiri [ekonomi pasar tidak bisa mengatur diri sendiri seperti yang diklaimnya], karena ia [ekonomi pasar] tidak mampu menghasilkan sendiri sesuatu yang berada di luar kompetensinya.<sup>31</sup>

Seperti pendahulunya, Paus Francis dalam *Himbauan Apostoliknya Evangelii Gaudium* (2013) juga dengan keras mengkritik kapitalisme global saat ini karena oposisinya terhadap peran negara dalam sektor ekonomi, yang memperjuangkan otonomi mutlak dari ekonomi

<sup>29</sup>ECUMENICAL COUNCIL OF VATICAN II, Pastoral Constitution of the Church in the Modern World *Gaudium et Spes*, (Rome, 7<sup>th</sup> of December 1965), No. 65.

<sup>30</sup>BENEDICT XVI, Encyclical Letter *Deus Caritas Est* (Rome, 25<sup>th</sup> of December 2005), No. 261.

<sup>31</sup>BENEDICT XVI, Encyclical Letter *Caritas in Veritate*, Ibid., No. 35.

pasar. Di dalam sistem ekonomi yang tidak diatur oleh negara, orang kaya dan mereka yang mempunyai kekuasaan dapat dengan mudah memangsa yang lemah dan mayoritas orang miskin seperti yang ditunjuk oleh Paus Fransiskus: "Di bawah hukum kompetisi [ekonomi tanpa regulasi] dan kemenangan dari yang paling kuat (*the survival of the fittest*), . . . pihak-pihak yang kuat akan memangsa pihak-pihak yang tak berdaya."<sup>32</sup> Selain itu, Paus Francis juga mengatakan bahwa penolakan terhadap hak pemerintah negara untuk menjaga dan menjamin kepentingan umum warga masyarakat akan menimbulkan kesenjangan yang semakin meningkat antara segelintir orang superkaya dan mayoritas orang miskin dan sifat tiran dari ekonomi pasar bebas:

Sementara penghasilan dari segelintir orang bertumbuh secara eksponensial, demikian juga kesenjangan yang memisahkan sebagian besar orang dari kemakmuran yang hanya dinikmati oleh segelintir orang. Ketidakseimbangan ini merupakan buah dari ideologi yang membela otonomi mutlak dari pasar dan spekulasi keuangan. Akibatnya, mereka menolak hak negara, yang telah dipercayakan untuk menjaga dan mengatur kebaikan bersama, untuk melaksanakan segala bentuk kontrol [huruf miring di sini adalah dari saya]. Dengan demikian, lahirlah sebuah tirani, yang tak kelihatan dan sering sangat virtual, yang secara sepihak dan tanpa henti memberlakukan hukum dan aturannya sendiri .... Dalam sistem ini, yang cenderung untuk melahap segala sesuatu yang berada di jalan menuju peningkatan profit, segala yang rapuh seperti lingkungan alam ciptaan menjadi tidak berdaya di hadapan kepentingan [ekonomi] pasar yang didewakan.<sup>33</sup>

Untuk mencegah ekonomi yang tidak adil dan sangat tiran ini, Gereja Katolik di dalam seluruh ajaran sosialnya membela peran khusus negara di bidang ekonomi untuk menjaga keadilan sosial dan kebaikan bersama. Akan tetapi Gereja juga tidak mendukung negara yang mengontrol, merencanakan dan menjalankan semua perekonomian negara seperti yang dipropagandakan oleh komunisme, di mana kapitalisme liberal yang ekstrim diganti dengan kapitalisme ekstrim dari negara totaliter, di mana kebebasan individu dalam aktivitas ekonomi semuanya diambil oleh negara. Gereja mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk pribadi dan sekaligus makhluk sosial. Oleh karena itu, tetap harus ada ruang bagi kebebasan pribadi dalam mengejar kebahagiaan dan bagi kepentingan bersama sebagai makhluk sosial. Harus ada keseimbangan antara ekonomi yang dijalankan dan dimiliki oleh sektor swasta dan yang dijalankan dan dimiliki oleh sektor publik.

### **Tentang Ketakadilan Kapitalisme Liberal Via Kompetisi Bebas Tanpa Kendali**

Salah satu doktrin dari kapitalisme neoliberal yang paling banyak mendapat kritikan sangat pedas adalah doktrin tentang kompetisi ekonomi tanpa kendali dan tanpa batas. Para nabi kapitalisme liberal, yang mulai dipimpin Adam Smith pada abad ke-18, menyatakan bahwa persaingan bebas di bidang ekonomi tanpa regulasi apapun (*free competition with no regulation at all*) merupakan satu-satunya jalan yang dapat menghantar setiap individu, setiap masyarakat dan setiap negara manapun di dunia untuk mencapai mimpi emas akan kemajuan dan kemakmuran. Oleh karena itu, mereka menuntut supaya ekonomi harus benar-benar bebas dari intervensi negara dan dari setiap aturan negara. Negara harus mundur dari sektor ekonomi dan ia hanya berfungsi untuk memberikan keamanan (*guard security*) bagi sebuah

---

<sup>32</sup>FRANCIS, Apostolic Exhortation *Evangelii Gaudium* (Rome, 24<sup>th</sup> of November 2013) No. 53.

<sup>33</sup>Ibid., 56.

kompetisi ekonomi bebas secara total. Perdagangan dan pasar harus benar-benar bebas secara total. Arus pasar modal harus bebas. Setiap sektor ekonomi harus diprivatisasi.

Alasannya adalah, kata para pengusung neoliberalisme, setiap pribadi manusia telah diberkahi dengan kebebasan (*freedom*) dan kepentingan pribadi (*self-interest*). Oleh karena itu, kehidupan dari setiap masyarakat ditandai dengan hal-hal spontan dan tidak terencana (*spontaneous and unplanned*) dari pilihan-pilihan yang dibuat oleh individu-individu yang mencintai kebebasan dan mementingkan diri sendiri. Mekanisme pasar dapat menyelaraskan pilihan-pilihan yang mengutamakan kepentingan diri sendiri ini. Karena mekanisme ini, para pendukung kapitalisme liberal berargumentasi bahwa pasar dan harga-harga barang bukan merupakan penemuan-penemuan yang dilakukan dengan sadar alias sengaja oleh manusia tapi mereka muncul secara spontan. Akan tetapi, seperti dikecam dengan sangat keras oleh banyak ahli ekonomi, keyakinan ekonomi liberal ini memang kedengaran bagus namun dalam kenyataannya ia bukan tanpa ilusi dan Gereja Katolik dalam ajaran sosialnya juga telah lama melihat ilusi ini dan telah memberikan peringatan sejak awal kelahiran ekonomi kapitalis liberal.

Paulus VI dalam Ensiklik *Populorum Progressio* (1967), sambil tetap mendukung gagasan pembangunan yang digulirkan setelah Perang Dunia II untuk negara-negara non-industri, menyebut adanya pembohongan laten (*latent fraud*) dan ketidakadilan dalam kompetisi bebas ekonomi yang diperjuangkan oleh para pendukungnya sebagai satu-satunya jalan untuk mengejar pembangunan manusia. Salah satu alasan utamanya adalah bahwa kompetisi bebas ekonomi tidak dapat berjalan secara adil jika negara-negara yang menjadi peserta di dalamnya tidak mempunyai kekuatan ekonomis yang sama. Misalnya, kompetisi bebas ekonomi antara negara-negara industri dan negara-negara non-industri jelas akan berjalan tidak seimbang seperti yang diingatkan oleh Paulus VI:

Negara-negara industri mengeksport produk-produk yang mereka pabrikan sendiri, untuk sebagian besarnya. Negara-negara yang masih terkebelakang, di sisi lain, hampir tidak memiliki apa-apa untuk diexport/dijual kecuali bahan-bahan mentah dan hasil-hasil pertanian. Sebagai akibat dari kemajuan teknologi, harga barang-barang pabrik meningkat terus secara pesat dan mereka mempunyai pasar yang jelas dan sudah siap. Tapi hasil-hasil pertanian dan bahan-bahan mentah yang dihasilkan oleh negara-negara yang masih terbelakang harus selalu tunduk pada perubahan-perubahan harga yang sering terjadi secara mendadak di pasar; mereka tidak ikut menikmati nilai pasar dari peningkatan produk-produk industri. Hal ini menimbulkan kesulitan yang serius bagi negara-negara berkembang. Mereka bergantung pada ekspor untuk sebagian besar dari ekonomi mereka dan untuk langkah-langkah pembangunan lebih lanjut. Dengan demikian negara-negara miskin menjadi semakin lebih miskin, sementara negara-negara kaya menjadi semakin lebih kaya.<sup>34</sup>

Oleh karena itu, Paulus VI lebih lanjut menyatakan bahwa prinsip perdagangan bebas dalam dirinya sendiri bukan merupakan sebuah mekanisme yang baik untuk mengatur perjanjian-perjanjian internasional. Prinsip perdagangan bebas dapat berjalan baik hanya kalau kedua belah pihak yang terlibat dalam perdagangan mempunyai kekuatan ekonomi yang kurang-lebih sama. Ekonomi perdagangan bebas yang demikian bisa merangsang kemajuan dan setiap negara peserta kurang-lebih akan sama-sama menikmati keuntungan.<sup>35</sup> Dengan kata lain, prinsip perdagangan bebas akan berjalan cukup baik hanya bila prinsip ini

---

<sup>34</sup>PAUL VI, Encyclical Letter *Populorum Progressio* (Rome, 26<sup>th</sup> of March 1967), No. 57.

<sup>35</sup>Ibid., No. 58.

diterapkan di antara sesama negara-negara industri atau di antara sesama negara-negara non-industri. Sebaliknya, hasilnya akan menjadi ketidakadilan yang besar kalau negara-negara yang terlibat di dalamnya tidak mempunyai kekuatan ekonomi yang sama. Selain fakta bahwa kompetisi itu akan berjalan tidak seimbang, orang juga tahu bahwa peserta yang kuat dari kompetisi ekonomi pasar bebas ini pasti akan selalu keluar sebagai pemenang. Sedangkan peserta yang lemah hampir pasti ditakdirkan untuk menjadi pecundang. Kelemahan dari kompetisi .302 bebas dari kapitalisme liberal mendorong Paulus VI untuk menyebut ekonomi perdagangan bebas sebagai sebuah konsep ekonomi yang tidak adil dan oleh karena itu harus dipertanyakan secara serius. Paulus VI mendeskripsikan kelemahan perdagangan bebas dari kapitalisme liberal ini sebagai berikut:

*Kasus ini sangat berbeda ketika negara-negara yang terlibat [dalam ekonomi dengan kompetisi bebas ini] tidak [mempunyai kekuatan ekonomi yang] setara. Harga-harga barang di pasar yang disepakati secara bebas dapat berubah menjadi sangat tidak adil. Harus diakui secara terbuka bahwa, dalam hal ini, prinsip dasar liberalisme (seperti lasimnya ia disebut) sebagai norma ekonomi pasar, harus terbuka untuk dipertanyakan lagi secara serius [semua huruf miring di sini adalah dari saya].<sup>36</sup>*

Kritik Paulus VI yang dilancarkan lebih dari lima puluh tahun yang lalu (1967) telah terbukti kebenarannya pada hari ini. Dalam menanggapi gejolak ketidakadilan sosial-ekonomi yang disebabkan oleh ideologi kompetisi kapitalisme liberal tanpa kendali dan kerugian yang telah ditimbulkan bagi mayoritas kaum miskin di seluruh dunia dan dampaknya terhadap degradasi keutuhan alam ciptaan, Benediktus XVI dalam *Caritas in Veritate* (2009) menggemakan lagi suara kenabian dari Paulus VI. Dia memberikan awasan bahwa ideologi ekonomi yang demikian – bahaya ketidakadilan laten dari kompetisi pasar bebas internasional – dapat berbalik melawan pribadi manusia sendiri dan seluruh umat manusia. Benediktus XVI menulis:

Gereja selalu berpendapat bahwa aktivitas ekonomi tidak pernah boleh dianggap sebagai sesuatu yang bertentangan dengan masyarakat manusia. Dalam dan dari dirinya sendiri, pasar [ekonomi] tidak pernah, dan tidak harus menjadi tempat di mana yang kuat menaklukkan yang lemah. Masyarakat manusia tidak harus melindungi dirinya dari pasar, seolah-olah perkembangan ekonomi merupakan *ipso facto* [italic asli dari Paus] memerlukan kematian relasi-relasi manusia yang otentik. Mesti diakui, pasar dapat menjadi sebuah kekuatan negatif [jahat], bukan karena dari kodratnya demikian, tetapi karena ideologi tertentu [kapitalisme neoliberal atau kapitalisme pasar *laissez-faire*] dapat membuatnya demikian [negatif, jahat]. Mesti diingat bahwa pasar tidak berada [dan berjalan] dalam keadaan murni. Ia dibentuk oleh konfigurasi-konfigurasi kultural yang menentukan dan memberikannya arah. Ekonomi dan keuangan, sebagai instrumen, dapat digunakan secara buruk ketika orang-orang yang memegang kekuasaan dimotivasi semata-mata oleh kepentingan pribadi. Instrumen-instrumen yang dalam dirinya sebenarnya baik bisa berubah menjadi instrumen yang berbahaya.<sup>37</sup>

Gereja dalam ajaran sosialnya memang mendukung mimpi para pemimpin politik dunia, yang mendirikan tata ekonomi dunia baru setelah Perang Dunia II, yaitu bahwa kerjasama ekonomi dan pembangunan dapat membawa perdamaian bagi semua bangsa. Sehubungan dengan hal ini, Paulus VI menulis: "Kemajuan peradaban [manusia] dan pembangunan ekonomi merupakan satu-satunya jalan menuju perdamaian."<sup>38</sup> Namun, Gereja melalui ajaran Yohanes XXIII tidak lupa untuk mengingatkan bahwa mimpi mulia tentang

---

<sup>36</sup> Ibid.

<sup>37</sup> BENEDICT XVI, Encyclical Letter *Veritas in Caritate* (Rome, 29<sup>th</sup> of June 2009), No. 36.

<sup>38</sup> PAUL VI, Encyclical Letter *Populorum Progressio*, Ibid., No. 83.

perdamaian dunia ini akan menjadi kenyataan hanya jika “semua usaha ekonomi diatur oleh prinsip keadilan sosial dan kasih”<sup>39</sup> dan rencana pembangunan ekonomi harus bebas dari agenda tersembunyi (*hidden agenda*), penipuan dan ketidakadilan dalam hal cara-cara yang ditempuh untuk mewujudkannya.

Sayangnya, sejarah dunia dalam lebih dari tujuh dekade terakhir menunjukkan bahwa idealisme ini bukan merupakan apa yang telah terjadi. Tujuh dekade terakhir ini (1944-2020) telah menyaksikan ekspansi ekonomi dengan perang tanpa henti, kekerasan dan kemiskinan global. Kekejaman dari pembangunan model kapitalistik saat ini dapat disimpulkan oleh Paus Francis dalam Himbauan Apostoliknya *Evangelii Gaudium*: "Dewasa ini semuanya berada di bawah hukum-hukum kompetisi dan kemenangan dari yang terkuat (*the survival of the fittest*), di mana yang kuat [yang kaya dan yang berkuasa] memangsa yang tak berdaya [orang miskin dan yang terpinggirkan]."<sup>40</sup>

### **Tentang Ilusi Pertumbuhan Exponensial Tanpa batas**

Doktrin lain dari ekonomi pasar *laissez-faire* yang juga mendapat banyak kritikan pedas adalah doktrinnya tentang pertumbuhan ekonomi secara eksponensial tanpa batas. Seperti dilihat dengan jelas dalam kebijakan-kebijakan ekonomi neoliberal yang dikenal dengan *Structural Adjustment Programs* (SAPs) yang telah diberlakukan oleh negara-negara kreditor melalui Bank Dunia dan IMF di negara-negara berkembang karena dililiti utang luar negeri selama lebih dari tiga dekade sejak 1980-an, para pendukung pembangunan model kapitalistik liberal berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan produk nasional bruto (PNB) adalah sebuah jalan tunggal menuju kemajuan umat manusia, pembangunan dan akhirnya kemakmuran.<sup>41</sup> Untuk mencapai pertumbuhan seperti itu, maka jalan harus dibuka seluas-luasnya melalui globalisasi dan privatisasi ekonomi seperti yang dijelaskan oleh David C. Korten:

*Globalisasi ekonomi* – yang dicapai dengan menghilangkan hambatan-hambatan terhadap arus barang dan uang di mana saja di dunia – mendorong kompetisi [ekonomi pasar bebas tanpa regulasi], meningkatkan efisiensi ekonomi, menciptakan lapangan kerja, menurunkan harga-harga barang konsumen, meningkatkan pilihan konsumen, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan umumnya menguntungkan hampir semua orang. *Privatisasi*, yang mengalihkan fungsi dan aset-aset [ekonomi] dari pemerintah ke sektor swasta, meningkatkan efisiensi. Tanggungjawab utama dari pemerintah adalah untuk menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan untuk memajukan perdagangan dan menegakkan aturan hukum yang berkaitan dengan *hak cipta* [paten] dan *kontrak* [huruf miring adalah asli dari penulis].<sup>42</sup>

Para nabi pengusung kapitalisme pasar bebas berargumentasi bahwa pertumbuhan ekonomi harus bertumbuh tanpa batas dan secara eksponensial. Menurut logika ekonomi ini, semakin banyak barang dan jasa yang diproduksi setiap tahun, maka semakin banyak masyarakat yang kebutuhannya akan terpenuhi dan sebagai hasil akhir mereka akan menjadi semakin sejahtera. Oleh karena itu, masyarakat didorong untuk membeli dan mengkonsumsi

---

<sup>39</sup>JOHN XXIII, Encyclical Letter *Mater et Magistra*, Ibid., No. 39.

<sup>40</sup>FRANCIS, Apostolic Exhortation *Evangelii Gaudium*, Ibid., No. 53

<sup>41</sup>KORTEN David C., *When Corporations Rule the World* (San Francisco, CA:Berrett-Koehler Publishers, 1996), p. 70.

<sup>42</sup>Ibid.

sebanyak-banyaknya barang dan jasa yang diproduksi oleh pasar internasional pada tahun tertentu, katakanlah misalnya tahun A. Kemudian keuntungan yang diterima oleh pasar atau investor dalam setahun akan diinvestasikan lagi untuk menghasilkan barang dan jasa pada tahun berikutnya atau tahun B dalam jumlah yang lebih besar dari tahun sebelumnya. Kemudian, total produk barang dan jasa yang dihasilkan dalam tahun C harus lebih besar dari tahun B, pada tahun D harus lebih dari tahun C, dan begitu seterusnya di tahun-tahun berikutnya. Jika pada tahun tertentu ekonomi tidak tumbuh sesuai dengan prinsip pertumbuhan eksponensial ini, semuanya – politisi, bisnis, pekerja, bank, investor – akan berada dalam bahaya kehilangan uang atau pekerjaan.

Para pemikir dunia seperti Donella Meadows, Jorgen Randers, Dennies Meadows, David C. Korten, Tim Jackson, Richard Heinberg, Richard Douthwaite dan Serge Lotouche, seperti dapat dilihat dengan jelas dalam karya mereka masing-masing,<sup>43</sup> semua dengan penuh keyakinan berpendapat bahwa prinsip pertumbuhan ekonomi secara eksponensial dari kapitalisme pasar bebas bukan hanya merupakan sebuah doktrin yang sehat tapi merupakan sebuah ilusi belaka. Doktrin pertumbuhan ekonomi tanpa batas dari ekonomi pasar bebas sama berbahayanya dengan kanker atau tumor ganas. Serge Latouche menyebut prinsip pertumbuhan ekonomi tanpa batas (*perpetual economic growth*) sebagai sebuah kecanduan (*addiction*).<sup>44</sup> Selain itu, doktrin ini mempercepat kerusakan ekologi secara besar-besaran, karena prinsip ekonomi ini bertentangan dengan fakta bahwa planet bumi ini memiliki keterbatasannya dan jumlah sumber daya alam yang dikandungnya juga terbatas. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain selain doktrin ekonomi pasar bebas ini harus dipertanyakan kembali seperti yang dikritik oleh Tim Jackson : "Konsep tentang ekonomi yang tidak bertumbuh (*non-growing economy*) mungkin dianggap sebuah laknat (*anathema*) oleh seorang ahli pengusung ekonomi liberal. Tapi gagasan tentang ekonomi yang bertumbuh secara terus-menerus tanpa batas juga merupakan sebuah laknat (*anathema*) bagi seorang ahli ekologi. Tidak ada subsistem dari sebuah sistem yang baik dapat bertumbuh tanpa batas secara fisik. Para ahli ekonomi [liberal] harus mampu menjawab pertanyaan tentang bagaimana sebuah sistem ekonomi yang bertumbuh tanpa batas bisa terjadi sistem ekologi [planet bumi] yang terbatas."<sup>45</sup> Joseph Stiglitz mendeskripsikan ketiadaan kommonsensikalitas (*non-commonsensicality*) dari pertumbuhan eksponensial dari kapitalisme *laissez-faire* sebagai berikut:

---

<sup>43</sup>Untuk informasi lanjut tentang debat mengenai masalah yang diakibatkan oleh pertumbuhan ekonomi secara eksponensial yang menjadi salah satu doktrin utama ekonomi kapitalis neoliberal, lihat MEADOWS Donella, RANDERS Jorgen and MEADOWS Dennis, *Limits to Growth: Thirty-Year Update* – First Published in 1972 (White River Junction, VT: Chelsea Green Publishing Company, 2004), KORTEN David C., *When Corporations Rule the World* (San Francisco, CA: Berrett-Koehler Publishers, 1996), *The Post-Corporate World: Life After Capitalism* (San Francisco, CA: Berrett-Koehler Publishers, 1999), *The Great Turning from Empire to Earth Community* (San Francisco, CA: Berrett-Koehler Publisher, 2006) dan *Agenda for A New Economy from Phantom Wealth to Real Wealth* (San Francisco, CA: Berrett-Koehler, 2009), JACKSON Tim, *Prosperity Without Growth: Economics for a Finite Planet* (London & Washington, DC: Earthscan Publishing for a Sustainable Future, 2011), HEINBERG Richard, *The End of Growth: Adopting to Our New Economic Reality* (Gabriola Island, BC, Canada: New Society Publishers, 2011), DOUTHWAITE Richard, *The Growth Illusion: How Economic Growth Has Enriched the Few, Impoverished the Many and Endangered the Planet* (Dublin: The Lilliput Press, 2000) dan LATOUCHE Serge, *Farewell to Growth* (Malden, MA: Polity Press, 2012).

<sup>44</sup>LATOUCHE Serge, *Farewell to Growth*, Ibid., p. 16.

<sup>45</sup>JACKSON Tim, *Prosperity without Growth*, Ibid., p. 14.

PDB (Produk Domestik Bruto) merupakan sarana untuk mengukur pertumbuhan ekonomi yang sangat mudah, tetapi ia juga bukan merupakan solusi yang paling baik dari masalah pembangunan. Pertumbuhan [ekonomi] juga harus berkelanjutan .... Anda bisa mendapatkan PDB dengan menghancurkan lingkungan, dengan menghabiskan sumber daya alam yang langka, dengan meminjam di luar negeri – tetapi pertumbuhan [ekonomi] seperti ini tidak berkelanjutan (*not sustainable*). Papua Nugini menebang hutan hujan tropisnya; hasil penjualannya memang meningkatkan PDB saat ini, tetapi dalam dua puluh tahun kemudian tidak akan ada lagi [hutan tropis] yang bisa ditebang [untuk tingkatkan PDB].<sup>46</sup>

Saya bisa menambahkan bahwa bagi orang-orang superkaya di negara-negara industri yang beroperasi melalui lembaga-lembaga ekonomi internasional – Bank Dunia, IMF dan WTO – tindakan memaksakan pengimplemtasian dari sistem ekonomi tidak sehat dalam bentuk kebijakan-kebijakan ekonomi neoliberal yang secara populer disebut *Structural Adjustment Programs* (SAPs) kepada negara berkembang yang dibebani utang luar negeri merupakan sebuah kejahatan serius dan melawan nilai-nilai universal cinta, keadilan dan persaudaraan. Seperti diargumentasikan sebelumnya, salah satu tujuan dari SAPs adalah untuk membuka jalan bagi korporasi transnasional untuk mengeksploitasi sumber daya alam dari negara-negara berkembang yang saat ini sebagian besar hanya dapat ditemukan di lahan-lahan pribadi warga masyarakat pedesaan dan para penduduk suku asli. Proyek-proyek ini sering dioperasikan dengan secara permanen menghancurkan mata pencaharian mereka seperti lahan pertanian dan hutan lindung.

Obsesi kapitalisme liberal dengan pertumbuhan ekonomi tanpa batas telah berada dalam pantauan profetis Gereja sejak lama dan telah berulang kali diingatkan bahwa doktrin ekonomi ini tidak memenuhi standar akal sehat (*the economy fails to meet the standards of common sense*). Waktu Konsili Vatikan II sedang berlangsung pada tahun 1962-1965, misalnya, Gereja Kristen Katolik secara profetis mengingatkan bahwa di satu sisi kemajuan teknologi untuk meningkatkan pembangunan memang harus dipromosikan, tapi tujuh akhir dari produksi ekonomi tidak bisa hanya semata-mata untuk meningkatkan hasil barang-barang atau laba keuntungan, melainkan mesti dalam rangka melayani kebutuhan manusia secara material seperti kebutuhan akan barang dan pelayanan jasa, dan melayani kebutuhan manusia secara spiritual seperti kebutuhan intelektual dan moral. Himbauan ini berlaku untuk setiap orang dan setiap kelompok serta setiap suku dan ras di mana saja di seluruh dunia.<sup>47</sup>

Tanpa secara langsung menyebut doktrin pertumbuhan ekonomi tanpa batas dari kapitalisme liberal, Paulus VI dalam Ensiklik *Populorum Progressio* (1967) mengingatkan akan bahaya laten dari akumulasi kekayaan yang pada akhirnya bisa memperbudak manusia sendiri: "Baik manusia sebagai pribadi maupun sebagai bangsa seharusnya tidak menganggap usaha menumpukkan harta dan kekayaan sebagai tujuan akhir [dari hidup, dari negara atau pembangunan]. Setiap kemajuan adalah ibarat pedang bermata dua. Ia dibutuhkan agar manusia bisa berkembang menjadi semakin manusiawi; tapi pada saat yang sama ia juga bisa memperbudak manusia sendiri jikalau manusia menganggapnya sebagai kebaikan tertinggi (*the supreme good*)".<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup>STIGLITZ Joseph E., *Making Globalization Work* (New York & London: W.W. Norton Company Ltd., 2006), p. 45.

<sup>47</sup>ECUMENICAL COUNCIL OF VATICAN II, Pastoral Constitution on the Church in the Modern World *Gaudium et Spes*, Ibid., No. 64.

<sup>48</sup>PAUL VI, Encyclical Letter *Populorum Progressio*, Ibid., No. 19.

Dalam *Octogesima adveniens* (1971) Paulus VI membahas hal yang sama secara berbeda. Dia menghimbau supaya ada keseimbangan antara pembangunan kuantitatif di bidang ekonomi dan pembangunan kualitatif menyangkut diri manusia: "Telah ada kecemasan terhadap batas-batas dan bahkan kejelekan dari pertumbuhan ekonomi hanya secara kuantitatif; ada keinginan untuk mencapai tujuan [pembangunan] kualitatif juga. Kualitas dan kebenaran relasi manusia, tingkat partisipasi dan tanggungjawab, tidak kurang penting bagi masa depan masyarakat daripada kuantitas dan berbagai barang yang diproduksi dan dikonsumsi" [huruf miring di sini adalah dari saya].<sup>49</sup>

Dalam *Evangelii Gaudium* Paus Fransiskus melakukan kritik profetis yang singkat namun keras: "Mekanisme ekonomi dewasa ini mempromosikan konsumsi yang berlebihan, namun jelas bahwa konsumerisme tanpa batas yang dikombinasikan dengan ketidaksetaraan menimbulkan kerusakan tatanan sosial secara berlipatganda."<sup>50</sup> Dengan kata lain, selain non-kommonsensikalitasnya yang sering dikritik oleh banyak ahli ekonomi, pertumbuhan ekonomi secara eksponensial tanpa batas yang dipropagandakan oleh para nabi kapitalisme neoliberal tidak bisa dikejar sebagai sebuah tujuan eksklusif dalam dirinya sendiri atau sebagai sebuah reduksi pembangunan hidup manusia. Pembangunan manusia tidak hanya selesai dengan memproduksi barang-barang material tanpa batas dan merangsang masyarakat manusia untuk membeli dan mengkonsumsikannya dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya.

### **Keimpulan: Pembangunan yang Otentik yang Diusulkan Gereja**

Seiring dengan kritikan terhadap praktek-praktek tak adil dari pembangunan model kapitalistik liberal ini, Gereja Kristen Katolik tak henti-hentinya mengusulkan cara-cara yang lebih baik tentang bagaimana seharusnya masyarakat manusia mengejar pembangunan peradabannya dan apa sebenarnya yang menjadi tujuan akhir (*the ultimate end*) dari pembangunan. Di antara prinsip-prinsip utama dari ajaran sosial Gereja adalah dalil bahwa supaya otentik pembangunan harus berpusat pada pribadi manusia (*it must be centred on human person*). Pembangunan harus sesuai dengan transendensi pribadi manusia. Ia harus bersifat integral dan tidak hanya terbatas pada pembangunan sektor ekonomi. Tujuan utamanya mesti dalam rangka kebutuhan manusia entah sebagai pribadi maupun sebagai anggota dari sebuah komunitas tertentu. Ia juga harus dipandu oleh nilai-nilai moral dan etika. Ia harus berkelanjutan dan ramah lingkungan. \$\$

## **KEPUSTAKAAN**

BALANYÁ Belèn, DOHERTY Ann, MA'ANIT Olivier Hoedeman Adam and WESSELIUS Erik, *Europe Inc.: Regional and Global Restructuring and the Rise of Corporate Power*. London & Sterling, VA: Pluto Press, 2003.

BENEDICT XVI, Encyclical Letter *Veritas in Caritate*. Rome, 29<sup>th</sup> of June 2009.

---

<sup>49</sup>PAULUS VI, Apostolic Letter *Octogesima Adveniens*, Ibid., No.41.

<sup>50</sup>FRANCIS, Apostolic Exhortation *Evangelii Gaudium*, Ibid., No. 60.

-----, Encyclical Letter *Deus Caritas Est*. Rome, 25<sup>th</sup> of December 2005.

BERTHOUD Gèrald, “Market” in SACH Wolfgang (ed.), *The Development Dictionary: A Guide to Knowledge as Power*. London and New York: Zed Books, 2010.

CAZDYN Eric & SZEMAN Imre, *After Globalization*. Chichester, UK: Willey-Blackwell Publisher, 2011.

DE RIVERO Oswaldo, *The Myth of Development: The Non-Viable Economies of the 21st Century*. New York: Zed Books: Books for Change, 2001.

DOUTHWAITE Richard, *The Growth Illusion: How Economic Growth Has Enriched the Few, Impoverished the Many and Endangered the Planet*. Dublin: The Lilliput Press, 2000.

ECUMENICAL COUNCIL OF VATICAN II, Pastoral Constitution of the Church in the Modern World *Gaudium et Spes*. Rome, 7<sup>th</sup> of December 1965.

ESCOBAR Arturo, *Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1995.

ESCOBAR Arturo, “Imagining a Post-Development Era,” dalam EDELMAN Marc and HAUGERUD Angelique, *The Anthropology of Development and Globalization: From Classical Political Economy to Contemporary Neoliberalism*. Oxford, UK & Victoria, Australia, 2005.

ESTEVA Gustavo, “Development,” dalam SACH Wolfgang (ed.), *The Development Dictionary: A Guide to Knowledge as Power*. New York: Zed Books, 2010.

FRANCIS, Apostolic Exhortation *Evangelii Gaudium*. Rome, 24<sup>th</sup> of November 2013.

GILPIN Robert, *Global Political Economy: Understanding the International Economic Order*. Princeton & Oxford: Princeton University Press, 2001.

GUTIERREZ GUSTAVO, *A Theology of Liberation*, 15<sup>th</sup> Anniversary Edition. Maryknoll, New York City, NY: Orbis Books, 1988.

HEINBERG Richard, *The End of Growth: Adopting to Our New Economic Reality*. Gabriola Island, BC, Canada: New Society Publishers, 2011.

JAKSON Tim, *Prosperity Without Growth: Economics for a Finite Planet*. London & Washington, DC: Earthscan Publishing for a Sustainable Future, 2011.

JENNINGS Justin, *Globalizations and the Ancient World*. New York: Cambridge University Press, 2011.

JOHN XXIII, Encyclical Letter *Mater et Magistra*. Rome, 15<sup>th</sup> of May, 1961.

KORTEN David C., *When Corporations Rule the World*. San Francisco, CA: Berrett-Koehler Publishers, 1996.

.....*The Post-Corporate World: Life After Capitalism*. San Francisco, CA: Berrett-Koehler Publishers, 1999.

- .....*The Great Turning from Empire to Earth Community*. San Francisco, CA: Berrett-Koehler Publisher, 2006.
- ..... *Agenda for A New Economy from Phantom Wealth to Real Wealth*. San Francisco, CA: Berrett-Koehler, 2009.
- KRISHNA Sankaran, *Globalization and Postcolonialism: Hegemony and Resistance in the Twenty-first Century*. New York, Toronto & Plymouth, UK: Rowman & Littlefield Publishers, 2009.
- LATOUCHE Serge, *Farewell to Growth*. Malden, MA: Polity Press, 2012.
- MARQUETTE Heather, *Corruption, Politics and Development: The Role of the World Bank*. New York: Palgrave MacMillan, 2003.
- MEADOWS Donella, RANDERS Jorgen and MEADOWS Dennis, *Limits to Growth: Thirty-Year Update – First Published in 1972*. White River Junction, VT: Chelsea Green Publishing Company, 2004.
- MUSU Ignazio Prof and ZAMAGNI Stefano Prof., “Introduction” in PONTIFICAL COUNCIL FOR JUSTICE AND PEACE, *World Development and Economic Institutions*. Vatican City: Vatican Press, 1994.
- NESTER William R., *Globalization, Wealth and Power in the Twenty-First Century*. New York: Palgrave Macmillan, 2010.
- NORDVEIT Bjorn Harald, *Constructing Development: Civil Society and Literacy in a Time of Globalization*. Hong Kong: Springer, 2009.
- PAUL VI, Encyclical Letter *Populorum Progressio*. Rome, 26<sup>th</sup> of March 1967.
- PERKINS John, *Confessions of An Economic Hit Man*. Great Britain: Ebury Press, 2006.
- RAPLEY John, *Understanding Development: Theory and Practice in the Third World*. London: Lynne Rienner Publishers Inc., 2007.
- RITZER George, *Globalization: A Basic Text*. Chichester, UK: Wiley-Blackwell, 2010.
- STEWART-HARAWIRA Makere, *The New Imperial Order: Indigenous Responses to Globalization*. London & New York: Zed Books / Wellington: Huian Publishers, 2005.
- STIGLITZ Joseph E., *Making Globalization Work*. New York & London: W.W. Norton Company Ltd., 2006.